DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indra Bastian. 2010.Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga

Jakarta

Sahdan. 2006. ADD untuk kesejahteraan rakyat Desa. Yogyakarta:

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Agus Mulyanto. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Penerbit Andi.

Yogyakarta

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo .2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo .2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Menurut Widjaja. 2005. Penyelenggaran Otonomi di Indonesia:

Menurut Abidin 2015 Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam rangaka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah. Jakarta

Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.

Abdul Halim 2002 Akuntansi keuangan daerah adalah:

Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Patton MQ. 2009. Metode Evaluasi kualitatif. Jakarta: Pustaka Pelajar

Kodoatie.2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta:

Penerbit Pustaka Pelajar

Jonathan Sarwono. 2006. Pengantar Statistik.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Penerbit Genesis.

Jurnal

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Makassar:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pratomo, Ario Wahyu. 2015. http://www.kemenkeu.go.id/emagz/media-keuanganjanuari-2016 diakses 02/05/16. Ramon, Dolly. 2014.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Riyansa, Ridho, Yunilma dan Fauziati Poppy. 2015.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.

Undang-Undang

_____. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

_____. 2015. Peraturan Pemerintah No. 22 Pasal 29 tentang Pembagian Dana Desa.

_____. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP).

_____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Pemerintahan Desa.

_____. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). _____. 2014. Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

_____. 2014. Undang-Undang No.6 tentang Desa.

_____. 2004. Undang-Undang No.33 Keuangan Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Internet

Data sekunder (http://www.kanalinfo.web.id/2016

www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.

http://pendidikanriyan.blogspot.co.id/2012/12/pembangunan-dalam-bidang-infrastruktur.html

www.elib.unikom.ac.id

www.pengertian Infrastruktur